PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM "BELA BELI KULON PROGO"

SKRIPSI

Disusun Oleh :

TARSISIUS DEDI

10522269

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG STRATA (S1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA"APMD"

YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 21 April 2016
Jam : 10 : 00 WIB
Tempat : RuangUjianSkripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
Dra. Sri Utami, M.Si. Ketua/Penguji/Pembimbing	
Dra. Safitri Endah Winarti,M. Si PengujiSamping I	
Drs. Hastowiyono, M.S PengujiSamping II	

APMD
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
17
TATA CIPTA ANGGATRA NAGARA
YOGYAKARTA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
PROGRAM STUDI
YOGYAKARTA
ILMU PEMERINTAHAN

Grogerius Sahdan, S.IP, M.A

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TARSISIUS DEDI

NIM : 10522269

Judul Skripsi : "PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM BELA BELI KULON PROGO"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri serta belum pernah diteliti sebelumnya. Jika terdapat referensi terhadap karya orang lain atau pihak lain, maka dituliskan sumbernya dengan jelas.

Demikian pernyataan ini penulis buat secara sadar dan bersungguh-sungguh.

Yogyakarta, April 2016

Penulis

Tarsisius Dedi

MOTTO

“Kita tidak selalu mendapat apa yang kita inginkan , tapi kita selalu mendapat dari apa yang kita kerjakan” – Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan cinta dan kasih berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada jenjang strata satu (S-1). Judul dalam penelitian ini adalah: Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mewujudkan Program Bela Beli Kulon Progo, di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, walaupun demikian penulis tetap mensyukuri karena skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos.,M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Shadan, S.IP.,M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
3. Ibu Dra.Sri Utami,M,Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M, Si dan Bapak Drs. Hastowiyono, Ms yang telah banyak mengarahkan dan memberikan banyak masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

5. Semua Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan civitas akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin untuk penelitian ini di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
7. Seluruh jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta pelaku usaha koperasi dan UMKM yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tua saya Bapak Sabinus Kaha dan Mama Elisabeth Dina yang telah banyak memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Elisabet Juita yang telah banyak mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kae Engkos, Kiki, Rolan, teman-teman mahasiswa STPMD”APMD” dan keluarga besar kos panjang yang telah banyak membatu dalam penyelesaian skripsi selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu atas terselesainya skripsi ini.

Yogyakarta, April 2016

Penulis

Tarsisius Dedi

INTISARI

Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan inovasi sebagai perwujudan pemerintah daerah dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal. Dengan gerakan "Bela Beli Kulonprog" program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, serta agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah dan sebagai upaya dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Program ini sendiri resmi dicanangkan sejak 25 Maret 2013 untuk mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulon Progo dengan mengutamakan produk sendiri daripada produk asing. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo menilai kebijakan "Bela Beli Kulon Progo" mampu menekan dampak krisis ekonomi tingkat daerah, sehingga tidak berdampak kepada peningkatan angka kemiskinan karena mampu menggerakkan perekonomian masyarakat kecil dan mengupayakan produk lokal diterima di pasaran. Dan dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan dinas yang banyak mewadahi dan bersentuhan dengan produk-produk lokal Kulon Progo.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Obyek penelitian adalah peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mewujudkan program "Bela Beli Kulon Progo". Subyek penelitian adalah kepala dinas, kepala bidang kelembagaan, kepala bidang permodalan, kepala bidang pemberdayaan, dan pelaku Koperasi dan UMKM. Teknik analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir menarik kesimpulan..

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan program "Bela Beli Kulon Progo" adalah :1)Penyelenggaraan kegiatan di bidang kelembagaan koperasi usaha mikro kecil menengah. Peranan Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pengurusan HKI terhadap produk-produk yang dibuat oleh masyarakat ataupun yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. 2)Penyelenggaraan kegiatan di bidang Permodalan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.yakni Bidang permodalan melakukan *link* pendanaan dari dana kementrian, melakukan pendampingan, membantu membuat proposal, melakukan monitoring dan melakukan evaluasi. 3)Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah. Peran yang dilakukan yaitu dengan mengadakan diklat. Dengan ikut sertanya Koperasi dan UMKM mengikuti diklat diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas para pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tercipta laporan keuangan yang baik dan akhirnya berdampak pada kualitas Koperasi yang terpercaya dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

Kedua Kegiatan Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Mewujudkan Program "Bela Beli Kulon Progo" :1)Di bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM melakukan sosialisasi tentang program bela beli Kulon Progo. 2) Di bidang permodalan Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan rapat tahunan yang tujuannya untuk memberikan pertanggunggjawaban pengurus, pengawas selama kegiatan selama satu tahun untuk menyampaikan program-programnya.3) Kegiatan bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM yaitu dalam bentuk diklat, pelatihan, pameran dan memfasilitasi terbitnya sertifikasi HAKI

DAFTAR ISI

Halaman Judul ……..... . i

Halaman Pengesahan ii

Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian..... iii

Halaman Motto iv

Kata Pengantar v

Intisari vii

Daftar Isi …… viii

Daftar Tabel ……. xi

Daftar Gambar …….. xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……..... 1

B. Rumusan Masalah ……..... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……..... 6

C.1. Tujuan Penelitian …….. 6

C.2. Manfaat Penelitian …… 6

D. Kerangka Konseptual ……7

D.1. Peran ……. 7

D.2. Pemerintah Daerah ……. 11

D.3. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) …… 14

D.4. Kebijakan Publik …… 16

D.5. Usaha Mikro Kecil Menengah …… 18

E. Ruang Lingkup ……..... 26

F. Metode Penelitian……..... 26

F.1 Jenis Penelitian …… 26

F.2 Subyek Penelitian ……..27

F.3 Lokasi Penelitian ……...……28

F.4 Jenis Data ……..……29

a) Data Primer…… 29

b) Data Skunder …… 29

F.5 Teknik Pengumpulan Data ……30

a) Observasi ……... 30

b) Wawancara …… 30

c) Dokumentasi …….. 31

F.6 Teknik Analisis Data ……31

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Kulon Progo 33

1. Kondisi Umum Kabupaten Kulon Progo 33

a. Letak geografis 33

b. Topografi 35

c. Demografi 36

d. Wilayah dan Prasarana 38

e. Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo 39

B. Profil Dinas Koperasi dan UMKM Kab Kulon Progo 43

1. Struktur Organisasi 43

2. Tugas dan Fungsi 44

3. Visi dan Misi 46

4. Tujuan dan Sasaran 49

5. Data SDM Dinas Koperasi Dan UMKM 50

BAB III PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

A. Peranan Dinas Koperasi Dalam Mewujudkan Program Bela Beli 52

A.1. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 58

A.1.1. Kebijakan Bidang Kelembagaan..... 58

A.1.2. Peranan Bidang Kelembagaan..... 62

A.1.3. Hasil Yang Dicapai Oleh Bidang Kelembagaan 65
.

A.2. Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 68

A.2.1. Kebijakan Bidang Permodalan..... 69

A.2.2. Peranan Bidang Permodalan..... 72

A.2.3. Hambatan bidang permodalan 74
A.2.4. Upaya bidang permodalan 73
A.2.5. Hasil bidang permodalan..... 77

A.3. Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 79

A.3.1. Kebijakan Bidang Pemberdayaan..... 80

A.3.2. Peranan Bidang Pemberdayaan..... 81

A.3.3. Hambatan bidang pemberdayaan..... 83
A.3.4. Upaya bidang pemberdayaan..... 84
A.3.5. Hasil yang di capai bidang pemberdayaan..... 85

B. Kegiatan Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Mewujudkan Program Bela Beli

1. Kegiatan Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM 87

2. Kegiatan Bidang Permodalan Dinas Koperasi dan UMKM 91

3. Kegiatan bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM 96

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 98

B. Saran 104

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Karakteristik Utama UMKM di Negara Berkembang 22

Tabel 1.2 Subyek Penelitian 29

Tabel 2.1 Estimasi Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Hasil SP2010,2014 39

Tabel 2.2 Keadaan SDM Dinas Koperasi dan UMKM 51

Tabel 2.3 Jabatan SDM Dinas Koperasi dan UMKM 51

Tabel 3.1 Daftar UMKM Memperoleh HKI Kabupaten kulon Progo Tahun 2014 68

Tabel 3.2 Penguatan Modal dan Bantuan Koperasi dan UMKM Tahun 2014 71

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Model interaktif Milles dan Huberman..... 31

Gambar 2.1 Kabupaten Kulon Progo 35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi pada saat ini telah meningkatkan kadar hubungan antar negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia. Hal tersebut tercermin dengan peluang untuk menjadi bagian dari produksi global.Dengan demikian setiap negara harus dapat menciptakan tingkat efisiensi dan produktifitas yang paling optimal, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi di pasar global. Dalam era globalisasi, setiap pelaku ekonomi diharuskan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing baik dalam memproduksi dan memasarkan suatu produk maupun menerobos batas-batasnya yang semakin tidak jelas atau dengan perkataan lain harus mampu bersaing dalam perekonomian yang kompetitif. Hal ini disebabkan dalam era globalisasi kemampuan produksi dan pemasaran dilandaskan pada kemampuan menciptakan barang atau jasa yang dapat dijual di seluruh dunia dan mampu bersaing secara global dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa tantangan global bertumpu pada globalisasi ekonomi yang melahirkan dunia tanpa batas, sehingga memungkinkan barang, jasa dan manusia bergerak bebas dari suatu negara ke negara lain. Indonesia sebagai sebuah negara yang berkembang, mau tidak mau harus mengikuti sistem

globalisasi yang ada, dimana cita-cita bangsa Indonesia secara jelas terlihat pada Pembukaan UUD 1945, yaitu “Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia”.Kondisi tersebut, dapat dicapai salah satunya apabila ada inovasi dan terobosan dari daerah ataupun pelaku-pelaku industri ekonomi.

Inovasi dan terobosan dari daerah sebagai pelaku-pelaku industri ekonomi perlu di dukung oleh sistem pemerintahan yang bagus agar terobosan tersebut dapat terealisasi dengan baik. Upaya pemeritantah dalam mendukung hal tersebut yaitu pemerintah daerah memberdayakan masyarakatnya, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Di samping itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Upaya membangkitkan prakarsa dan mewujudkan aspirasi masyarakat secara efektif antara lain akan sangat tergantung kepada ketersediaan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satunya.Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang paling berpengaruh untuk daerah.Pendapatan Asli Daerah ini dapat dijadikan penerimaan unggulan dalam memompa dan mengalirkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah otonom.Peran Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan sangat penting karena sebagian dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, penggalian potensi sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dengan didukung oleh kinerja pengelolaan yang baik dan sumber

daya manusia yang berkualitas akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pemerintah daerah (Ayi Karyana, 2005: 12).

Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan inovasi sebagai perwujudan pemerintah daerah dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal. Dengan gerakan "Bela Beli Kulonprogo" program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, serta agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah dan sebagai upaya dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Strategi Bupati Kulon Progo dr. Hasto Wardoyo dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sangat menarik, masyarakat daerah diajak untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk lokal. "Perangi Teknologi Dengan Ideologi", itulah prinsip yang di gelorakan bupati Hasto Wardoyo dalam membangun Kulon Progo. Salah satu implementasi dari prinsip yang dipegangnya tersebut yaitu melalui Program Bela Beli Kulon Progo ini (http://www.kulonprogokab.go.id).

Mahatma Gandhi pada awal abad XX pernah menyuarakan semangat swadesi yang kemudian diterjemahkan sebagai berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) oleh Bung Karno. Secara ekonomi, swadesi mengandung pengertian kemandirian yang bertumpu pada konsumsi modal (capital expenditure) dari negeri sendiri. Secara politik, berarti kebanggaan akan negerinya sendiri. Pelajaran yang dapat diambil ialah bahwa kebanggaan akan negeri sendiri dapat menumbuhkan kemandirian bila diimplementasikan menjadi aksi pembelaan

yang nyata dengan dukungan pengerahan financial seperti membeli produk-produk lokal.

Maka dari itu, dalam konteks percepatan pembangunan kabupaten Kulonprogo, swadesi ini diwujudkan dalam kebijakan Bela dan Beli Kulonprogo. Slogan ini bermakna bahwa jika anda ingin membela dan memajukan Kulonprogo cukup dengan membeli produk Kulonprogo. Dimulai dari sekarang, dari yang sederhana, mudah dan riil. Strategi ini menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi daerah yang mandiri, dan tidak mustahil menjadi *big push* bagi perekonomian regional.

Program ini sendiri resmi dicanangkan sejak 25 maret 2013 untuk mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulon Progo dengan mengutamakan produk sendiri daripada produk asing. Dukungan masyarakat terhadap produk lokal diharapkan mampu menghadapi persaingan Asean Free Trade Area (AFTA) di tahun 2015 (www.tifafoundation.org). Produk-produk lokal pun diluncurkan antara lain air batik *"Geplek Renteng*", "Gula Semut", minuman dalam kemasan yang dikelola oleh PDAM, yang diberi merek "AirKU" dan lain-lain. PDAM Kulon Progo saat ini mampu memproduksi 100 ribu karton AirKU setiap bulan, seluruh kegiatan di lingkungan pemerintah kabupaten, dinas, sekolah wajb menggunakan "AirKU", warga yang memiliki hajatan juga diimbau menggunakan "AirKU" yang harganya lebih murah. Sekarang setiap bulannya PDAM mampu menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 300 juta(http://www.jpip.or.id). Sementara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) Kab.Kulon Progo mewadahi atau banyak bersentuhan dengan produk-produk lokal tersebut.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo menilai kebijakan "Bela Beli Kulon Progo" mampu menekan dampak krisis ekonomi tingkat daerah, sehingga tidak berdampak kepada peningkatan angka kemiskinan.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kulon Progo Sugeng Utama mengatakan bahwa Kebijakan "Bela Beli Kulo Progo" mampu menggerakkan perekonomian masyarakat kecil dan mengupayakan produk lokal diterima di pasaran, hal ini mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan menggerakkan perekonomian masyarakat.Melalui program ini juga mampu menekan peningkatan jumlah kemiskinan di Kulon Progo, masyarakat diberdayakan, sehingga mereka bekerja dan penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan (www.antarayogya.com). Bahkan Bupati Kulon Progo dr.H. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) mengatakan pendapatan asli Daerah (PAD) kabupaten Kulon Progo naik dari sebelumnya di tahun 2014 PAD kulon progo hanya Rp 98 miliar, sekarang menjadi Rp 158 miliar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bupati Kulon Progodi Hotel Cavinton, Yogyakarta,Kamis, 21 Mei 2015 (http://nasional.tempo.co/read/news).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mewujudkan program Bela Beli Kulon Progo"**

Berbagai permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan program bela beli Kulon Progo hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan program tersebut pada masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi timbulnyapermasalahan di masa yang akan datang, perlu ditingkatkan koordinasi dengan*stakeholder* maupun instansi yang lain, khususnya dalam hal :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat formal/nonformal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat berperan secara optimal dalammenjalankan tugas sebagai pembina sektor perindustrian, perdagangan dan energisumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo.
3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil menengah perluditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena sektor tersebutmerupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo dan terbuktimemberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zarkasi Efendi, Alim Mustofa, Budi Satria Maulana, Nuraini, Yogi Eka Chalid Farobi. 2012. *Demokrasi Ekonomi*: *Koperasi dan Pengembangan - Ekonomi Kerakyatan*. Malang:Averroes Press.

Ayi Karyana.2005. *Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Penggelolaan Retribusi Pasar*. Jurnal Organisasi dan Solusi Manajemen, Volume 1, Nomor 1.

Hidayat Arif. 2013. Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi Kenerja Karyawan Untuk Promosi Jabatan Struktural Pada Bimbingan Belajar Sciencemaster Menggunakan Metode GAP Kompetensi (Profile Matching), Jurnal Teknologi Technoscientia, Vol.5 No.2 Februari 2013, ISSN : 1979-8415

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan UMKM Pustaka Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014

Moleong, Lexy J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurcholis Hanif. 2007. *Teori dan Politik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo

Robiyati Produngge ,Jurnal: *Peran Pemerintah Daerah Dalam peningkatan kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan*, Volume 7,Maret 2010

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta

Suharto Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebgai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Suhardono Edy. 1994. *Teori Peran Konsep,Derivasi, dan implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Saebani. 2008. *Metode Penelitian. Bandung*: CV. Pustka Setia

Susanto S. Astrid. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* .jakarta: Bina Cipta.

Soekamto Soejono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Yogyakarta: Rajawali Press.

Suyanto, Narwoko.2006.*Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

Utama I Made Arya. 2007. *Hukum Lingkungan. Bandung*: Pustaka Sutra.